

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diteliti. Namun penulis mengutip beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penelitiannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Achmad Azizi, Hikmah dan Sapto Adi Pranowo di Kota Semarang Utara, Jawa Tengah. Yang mana penelitian ini berfokus pada menganalisis peran gender dalam pengambilan keputusan pada rumah tangga nelayan di Kota Semarang Utara, Jawa Tengah, yang berfokus pada pembagian peran antara suami-istri dalam kegiatan domestik, produktif dan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey berupa studi kasus. teknik pengumpulan data menggunakan Focus Group (FGD) dengan kelompok laki-laki dan perempuan, dan wawancara tersruktur menggunakan kuesioner tertutup. Dalam penelitian ini menemukan bahwa Tidak ada pengaruh gender

(keputusan dibuat bersama suami-istri) dalam kegiatan domestik, kegiatan produktif berupa investasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dominasi laki-laki (suami) hanya ditemukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha perikanan.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Yanuarius You, Enos H. Rusmansara, Johz Mansoben dan Agustina Ivone Poli di Jayawijaya, Papua. Yang mana penelitian ini berfokus pada menganalisis relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan Hubula Suku Dani di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang berfokus pada perbedaan peran gender di ranah domestik dan publik serta dampak sistem patriarki terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa data primer hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan data sekunder, dokumen terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Hubula memposisikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Pembagian peran berbasis adat, laki-lakinya menangani acara adat dan perang (ranah publik), sedangkan perempuannya mengurus kebun, ternak, rumah tangga dan anak (ranah domestik). Terjadi disfungsi struktural karena perang tidak lagi terjadi dan adat memudar dan dominasi patriarki semakin menindas, menimbulkan ketidakadilan gender. Dampaknya berupa kekerasan

terhadap perempuan (fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, intimidasi dan ancaman).

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Frestiana Dyah Mulasari di Provinsi Jawa Tengah. Yang mana penelitian ini berfokus pada peran gender perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2008-2012, yang dilihat dari 3 aspek, Angka Harapan Hidup Perempuan (aspek kesehatan), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (aspek pendidikan) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (aspek ketenagakerjaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey. teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini menemukan bahwa angka harapan hidup perempuan memiliki nilai lebih baik dibandingkan laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan masih di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan masih adanya kesenjangan gender di Jawa Tengah yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan, meskipun dalam aspek kesehatan perempuan menunjukkan capaian yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di Jawa Tengah yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan, meskipun dalam aspek kesehatan perempuan menunjukkan capaian yang lebih baik.
4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Sulfiana, Muhammad Syukur dan Ridwan Said Ahmad di Indonesia. Yang mana penelitian ini

berfokus pada membahas diskriminasi gender terhadap perempuan dalam ranah politik di Indonesia, mengkaji bagaimana budaya patriarki mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses politik dan menganalisis hambatan-hambatan representasi perempuan dalam partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. teknik pengumpulan data berupa penelusuran dan kajian kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan seperti buku, jurnal, dan dokumen. juga menggunakan referensi dari Miqzaqon T dan Purwoko tentang penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa budaya patriarki yang mengakar kuat secara turun-temurun membuat laki-laki merasa superior dibanding perempuan, kedudukan laki-laki ditempatkan lebih tinggi sehingga sering terjadi praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, pemenuhan kuota 30% perempuan dalam politik sulit dipenuhi karena keterbatasan akses dan perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan dalam keanggotaan dewan.

5. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Sarina dan Ridwan Said Ahmad di Kawasan Industri Makasar. Yang penelitian ini berfokus pada mengkaji penyebab terjadinya diskriminasi gender di Kawasan Industri Makassar dan mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan pekerja di Kawasan Industri Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. juga

menggunakan teknik validasi member check. Dalam penelitian ini menemukan bahwa adanya penyebab diskriminasi yakni, stereotip bahwa perempuan lemah, anggapan perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, kurangnya pemahaman kesetaraan gender, pembatasan kerja bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. juga adanya bentuk diskriminasi yakni, pelecehan seksual verbal, kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan, dan stereotip tentang kelemahan perempuan.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Jurnal

NO	Nama/Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Achmad Azizi, Hikmah dan Sapto Adi Pranowo (2017)	Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey berupa studi kasus. teknik pengumpulan data menggunakan Focus Group (FGD) dengan kelompok laki-laki dan perempuan, dan wawancara tersruktur menggunakan	Tidak ada pengaruh gender (keputusan dibuat bersama suami-istri) dalam kegiatan domestik, kegiatan produktif berupa investasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dominasi laki-laki (suami) hanya ditemukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha perikanan.	Kajian Penelitian terdahulu berfokus pada ada aspek lain dari gender dan peran sosial, seperti pengambilan keputusan di rumah tangga atau analisis peran gender dalam konteks ekonomi. Sedangkan Kajian penelitian ini berfokus pada persepsi organisasi dalam

		kuesioner tertutup.		membentuk stereotip gender dalam memposisikan perempuan pada pelayanan publik.
2.	Yanuaris You, Enos H.Rusmansara, Johz Mansoben dan Agustina Ivone Poli (2019)	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. teknik pengumpulan data berupa data primer hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD). dan data sekunder, dokumen terkait topik penelitian.	Masyarakat Hubula memposisikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Pembagian peran berbasis adat, laki-lakinya menangani acara adat dan perang (ranah publik), sedangkan perempuannya mengurus kebun, ternak, rumah tangga dan anak (ranah domestik). Terjadi disfungsi struktural karena perang tidak lagi terjadi dan adat memudar dan dominasi patriarki semakin menindas, menimbulkan	Kajian penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer hasil observasi, wawancara dan Focus group Discussion (FGD) Dan data skunder dokumen terkait Sedangkan Kajian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi.

			<p>ketidakadilan gender.</p> <p>Dampaknya berupa kekerasan terhadap perempuan (fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, intimidasi dan ancaman)</p>	
3.	Frestiana Dyah Mulasari (2015)	<p>Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey. teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.</p>	<p>Angka harapan hidup perempuan memiliki nilai lebih baik dibandingkan laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan masih di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di Jawa Tengah yang tercermin dari berbagai indikator</p>	<p>Kajian penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey. teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.</p> <p>Sedangkan Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mrnggambarkan fenomena-</p>

			pembangunan, meskipun dalam aspek kesehatan perempuan menunjukkan capaian yang lebih baik.	fenomena di lapangan.
4.	Sulfiana, Muhammad Syukur dan Ridwan Said Ahmad (2023)	Pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. teknik pengumpulan data berupa penelusuran dan kajian kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan seperti buku, jurnal, dan dokumen. juga menggunakan referensi dari Miqzaqon T dan Purwoko tentang penelitian kepustakaan.	budaya patriarki yang mengakar kuat secara turun-temurun membuat laki-laki merasa superior dibanding perempuan, kedudukan laki-laki ditempatkan lebih tinggi sehingga sering terjadi praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, pemenuhan kuota 30% perempuan dalam politik sulit dipenuhi karena keterbatasan akses dan perempuan tidak diberi tanggung jawab	Kajian penelitian terdahulu menggunakan metode kajian pustaka dan studi pustaka. Kajian penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode fenomenologi untuk melihat penelitian yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan tajam untuk menyelidiki suatu kasus yang spesifik.

			yang signifikan dalam keanggotaan dewan.	
5.	Sarina dan Ridwan Said Ahmad (2021)	Pendekatan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. juga menggunakan teknik validasi member check.	Adanya penyebab diskriminasi yakni, stereotip bahwa perempuan lemah, anggapan perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, kurangnya pemahaman kesetaraan gender, pembatasan kerja bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. juga adanya bentuk diskriminasi yakni, pelecehan seksual verbal, kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan, dan stereotip tentang kelemahan perempuan.	Kajian penelitian terdahulu menggunakan teknik member check berupa proses pengecekan data kepada narasumber atau subjek penelitian. Sedangkan Kajian penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, waktu dan teknik sebagai teknik keabsahaan data atau validasi data.

Sumber: data diolah oleh penulis

B. Kerangka Teori

1. Teori Administrasi Publik

a.) Konsep Dasar Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari Bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to reserve” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dana tau memenuhi.

Sedangkan menurut Dimock (1982), kata administrasi itu berasal dari kata “ad” dan “minister” yang berarti juga “to serve”. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

b.) Administrasi Publik

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960), mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal

berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa “administrasi publik adalah suatu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus cara pemerintah untuk berintraksi ataupun memahami sekelompok masyarakat, melalui kerja sama dua orang atau lebih secara efisien, efektif dan rasional dalam melaksanakan pemenuhan tanggung jawab dari tugas-tugas pemerintahan.

2. Paradigma Administrasi

Denhardt dan Denhardt 2003 dalam Sabaruddin 2015 membagi perkembangan ilmu administrasi publik pada tiga paradigma besar, yaitu:

a.) Paradigma Administrasi Publik Klasik tahun 1887-1987

Konsep administrasi publik klasik dalam perkembangannya menurut Denhardt dan Denhardt dalam Sabaruddin 2015:16 memunculkan konsep-konsep baru yaitu: Pertama, model rasional pandangan Herbert A Simon yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas. Kedua, pilihan publik. pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu:

- 1.) Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.
 - 2.) Teori ini memusatkan perhatian pada barang publik sebagai output dari badan-badan publik.
 - 3.) Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilhan..
- b.) Paradigma New Public Management/Manajemen Publik Baru tahun 1990-2000

Lahirnya konsep *new public management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Dernhardt dan Dernhardt 2013:13 dalam Sabaruddin 2015 menjelaskan perspektif *new public management* semua pimpinan/manajer didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk memcapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial..

- c.) Paradigma New Public Service (Pelayanan Publik Baru)

Menurut Dernhardt dan Dernhardt 2003:170 (dalam Sabaruddin 2015:21) perspektif NPS mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang semata

sebagai kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam pendekatan NPS, administrasi publik tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki NPM karena administrasi Negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan tetapi memberikan pelayanan untuk kepentingan demokrasi (Dernhardt dan dernhardt dalam Syafri 2012:196).

d.) Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran paradigma Administrasi Publik diungkapkan oleh Benington dan Hartley yang dikutip oleh Wilson (2002) dalam Meehan (2003), serta Denhardt dan Denhardt (2000 dan 2003) tentu saja akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Administrasi Publik dikemukakan Benington dan Hartley, telah bergeser dari model Administrasi Publik Tradisional dan New Public Management menuju ke model Citizen- Centered Governance oleh Denhardt dan Denhardt (2000 dan 2003) disebut sebagai *the New Public Service*. Pergeseran tersebut akan membawa Pemerintahan Daerah di Indonesia yang merupakan bagian dari Administrasi Publik untuk menyesuaikan dirinya dengan paradigma terkini dari Administrasi Publik tersebut.

3. Pelayanan Publik (*Public Service*)

a.) Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian dari pelayanan publik terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Kepmenpan ini memberikan pengertian terhadap pelayanan publik, pelayanan publik yaitu; segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sri Maulidiah, p 69).

Pada hakekatnya suatu pelayanan publik memiliki suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka (bertemu) antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi juga terletak pada seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya (pelayanan dalam arti luas), seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan jembatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang baik, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana pendidikan dan sarana kesehatan, kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perekonomian, kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, kebutuhan masyarakat akan rasa aman, tertib

dan tentram dan segala bentuk proses pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

b.) Faktor Penilaian dalam Pelayanan Manajemen Pemerintahan

Dalam hal penilaian terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh unsur instansi birokrasi pemerintah terhadap unsur masyarakat, menurut Supriyatno (2009;320) bahwa; terdapat 7 (tujuh) faktor yang sering dilibatkan dalam penilaian bidang, yakni faktor dampak terhadap masyarakat, faktor kepemimpinan, faktor persepsi pelanggan, faktor dampak institusi terhadap masyarakat, faktor indikator keuangan, faktor keterlibatan pemerintah, dan faktor badan-badan khusus. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada faktor persepsi, sebagai berikut;

- Persepsi Pelanggan

Persepsi pelanggan, maksudnya adalah pelanggan yang meliputi unsur dari masyarakat kecil. Untuk mengetahui persepsi dari pelanggan atau masyarakat yang menerima hasil suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik, dan juga harus dilakukan suatu riset pasar (pengumpulan data tentang peluang dan tantangan), sehingga berbagai bentuk keinginan dari masyarakat akan dapat diketahui dan dipenuhi secara keseluruhan yang telah dibuat tolak ukurnya (*standard*) oleh unsur lembaga pemerintah.

c.) Kelurahan Sulingan Sebagai Instansi Pelayanan Publik

Kelurahan Sulingan adalah salah satu kelurahan yang terletak di

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kelurahan adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, berfungsi sebagai lembaga publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah.(A. R. Soeprapto, 2012).

4. Teori Gender

a.) Pengertian Gender

Dalam memahami gender, Heddy Shri Ahimsa membedakannya menjadi enam pengertian, yakni 1) gender sebagai sebuah istilah asing dengan makna tertentu; 2) gender sebagai suatu fenomena sosial budaya; 3) gender sebagai suatu kesadaran sosial; 4) gender sebagai suatu persoalan sosial budaya; 5) gender sebagai sebuah konsep untuk analisis; 6) gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan (Heddy, 2000). Untuk penelitian ini, uraian berikut lebih tertuju pada gender sebagai istilah asing dan gender sebagai perspektif untuk melihat realitas.

Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, gender, yang berarti “jenis kelamin” (John dan Hasan, 1983). Dalam kamus Webster, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan Perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku(Victoria,1984).

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Helen, 1986).

Hilary M. Lips dalam bukunya "*sex and Gender: An Introduction*" mengungkapkan bahwa gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*) (Hilary, 2001). Pendapat ini menurut Nasaruddin sejalan dengan pendapat kaum feminis.

Elaine Shorwalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Nassaruddin, 2001). Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*analitic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. H.T Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Karena itu Nasaruddin Umar mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*) (Linda, 1999), bukan hanya sesuatu yang bersifat kodrati.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-

laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

b.) Stereotip Gender

Stereotip gender adalah sebuah pandangan dimuka umum terkait kesan dan karakteristik masyarakat yang di lakoni oleh manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (Ulhasanah, 2021). Selain itu stereotip gender ialah sebuah keyakinan dari seorang laki-laki dan perempuan terkait masculinities yang merujuk pada laki-laki dan feminis yang merujuk pada perempuan itu sendiri (Wijayanti, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa stereotip gender adalah alat ukur masyarakat terkait laki-laki dan perempuan yang berkembang di daerahnya, dalam konteks ini biasanya dalam lingkungan yang berbeda menganggap bahwasanya derajat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seks tidak bisa dipisahkan dengan aspek yang mana aspek ini sebagai dorongan kenapa seks tersebut bisa terjadi.

Isu dari hubungan antara seks dan stereotip ini sendiri jika dikaji secara mendalam bahwa bahasan hal ini akan sesuai dengan tatanan masyarakat. Bahwasanya bisa dilihat bahwa kesetaraan gender itu apakah terlihat di masyarakat itu sendiri (Azisah, 2009). Dan stereotip gender adalah sebuah pandangan dimuka umum yang mengaitkan

antara kesan dan masyarakat. Sehingga pada dasarnya kita sebagai manusia harus selalu mengikuti kemajuan zaman dan tetap taat di jalan yang sudah ditentukan Tuhan agar keseimbangan antara kehidupan pribadi (seks) dan gender itu didapati dalam kehidupan.

c.) Peran Gender Stereotip

Peran gender stereotip merupakan masalah yang meluas dalam masyarakat saat ini, di mana individu sering kali diberi peran budaya berdasarkan gender mereka. Hal ini dapat menyebabkan stereotip yang merugikan yang membatasi potensi individu dan mencegah mereka mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Dalam bukunya "*Lean In: Women, Work, and the Will to Lead*" (2013), Sheryl Sandberg membahas bagaimana stereotip gender dapat menghambat perempuan di tempat kerja, karena mereka sering diharapkan untuk bersikap mengasuh dan patuh daripada berani dan merendahkan diri. Menurut (Mills & Mills, 1996), Peran gender dipelajari dalam keluarga dan melalui pendidikan. Stereotip gender ada dalam masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sering kali diharapkan berperilaku dengan cara tertentu berdasarkan kepercayaan dan norma masyarakat. Harapan-harapan ini sering kali membatasi kesempatan perempuan dan anak perempuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau memangku pekerjaan tertentu. Dalam pendidikan, stereotip dapat membatasi keputusan masa depan siswa mengenai berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pilihan profesi dan pengembangan karier. (Andriani,

D, 2019) Stereotip membuat kedua jenis kelamin tetap dalam profesi tradisional dan tidak koheren dengan berbagai jenis peluang yang ada.

Salah satu stereotip gender yang umum adalah bahwa laki-laki seharusnya kuat dan dominan, sementara perempuan diharapkan menjadi lemah dan tunduk. Hal ini dapat berbahaya bagi laki-laki dan perempuan karena hal ini menghalangi kemampuan mereka untuk mengekspresikan perasaan dan menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dalam artikelnya "*The Role of Gender Orientations in Interactions between Men and Women*" (2016), John Smith berpendapat bahwa kesalahpahaman ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan, karena individu dapat merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan peran budaya ini.

d.) Kebijakan yang koheren dengan penelitian ini

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam hukum internasional dan semakin dipromosikan oleh pemerintah di seluruh dunia. Di Indonesia, kesetaraan gender merupakan tujuan kebijakan inti, sebagaimana dibuktikan oleh komitmen pemerintah untuk mempromosikan kebijakan tersebut di semua bidang pengembangan kebijakan. Salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan ini adalah Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengakui pentingnya kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia dan mengamanatkan pemerintah untuk mengambil langkah-

langkah khusus untuk mempromosikan pengarusutamaan kesetaraan gender di semua bidang pembuatan kebijakan. Ini termasuk memastikan hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Peraturan ini merupakan langkah maju yang besar dalam upaya pemerintah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di semua bidang masyarakat. Dengan disahkannya peraturan ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menjamin hak serta martabat semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Komisi Kesetaraan Gender bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan memantau kemajuan agenda gender di Indonesia. Peran Komisi adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memastikan implementasi peraturan yang efektif, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) juga merupakan kebijakan penting yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Instruksi ini menekankan perlunya integrasi perspektif gender dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PUG bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses,

partisipasi, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap program dan kebijakan. Dalam instruksi ini, pemerintah diharapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan dalam berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

Kedua kebijakan ini, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000, merupakan langkah maju yang besar dalam upaya pemerintah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di semua bidang masyarakat. Dengan penerapan kedua kebijakan ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menjamin hak serta martabat semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Komisi Kesetaraan Gender bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memantau kemajuan agenda gender di Indonesia, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya..

e.) Teori yang koheren dengan penelitian ini

1.) Teori Gendered Organizations (Acker, 1990)

Teori ini menjelaskan bagaimana struktur organisasi sering kali dibentuk dengan asumsi bahwa pekerja ideal adalah pria. Hal ini mengakibatkan marginalisasi perempuan dalam posisi-posisi strategis. Penelitian ini akan menggunakan teori ini untuk

menganalisis bagaimana stereotip gender mempengaruhi penempatan pegawai di Kelurahan Sulingan.

2.)Teori Kepemimpinan dan Bias Gender (Patricia Yancey Martin, 2003)

Martin menjelaskan bahwa stereotip yang menganggap pria lebih baik dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi bias gender di tempat kerja, yang berpotensi menghambat kemajuan perempuan dalam karir mereka.

3.)Teori Underrepresentation (Catalyst, 2007)

Catalyst menemukan bahwa bias yang menganggap pria lebih kompeten daripada wanita, meskipun performa mereka sama, menyebabkan underrepresentation wanita dalam posisi manajerial dan eksekutif. Penelitian ini akan meneliti bagaimana bias ini tercermin dalam penempatan pegawai di Kelurahan Sulingan.

4.)Teori Ekspektasi Sosial (Valian, Virginia, 1998)

Valian menjelaskan bahwa ekspektasi sosial yang dikondisikan bahwa pria lebih cocok untuk posisi kepemimpinan dapat membentuk persepsi yang merugikan terhadap perempuan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana ekspektasi ini mempengaruhi persepsi terhadap pegawai perempuan di Kelurahan Sulingan.

5.) Teori Kesenjangan Upah (Hartmann, Heidi, 1976)

Hartmann menyoroti bahwa sistem kerja yang maskulin seringkali menempatkan pria di posisi dengan gaji lebih tinggi dan tanggung jawab lebih besar, sementara perempuan lebih sering ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kesenjangan ini terlihat dalam struktur penempatan pegawai di Kelurahan Sulingan.

f.) Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Gender

Administrasi publik merupakan bidang studi yang membahas tentang kebijakan publik, pengelolaan organisasi publik, pelayanan publik, serta masalah sosial dan politik yang berkaitan dengan pemerintahan. Hubungan antara ilmu administrasi publik dengan gender sangat penting karena gender merupakan dimensi sosial yang memengaruhi cara kebijakan publik dan pelayanan publik diimplementasikan. Dalam artikel ini, kita akan membahas hubungan antara ilmu administrasi publik dengan gender serta dampaknya terhadap pembangunan sosial.

Menurut Elson, Nuruzzaman, dan Sabarwal (2006), gender merupakan konstruksi sosial yang bertujuan untuk membedakan peran, hak, kewajiban, dan akses terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks ilmu administrasi publik, gender memengaruhi cara kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam beberapa kasus, kebijakan

publik yang tidak peka gender dapat menciptakan perbedaan sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu contoh hubungan antara ilmu administrasi publik dengan gender adalah standar pengambilan keputusan pemerintah. Menurut Holter (2014), perempuan kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan di sektor publik. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi para profesional administrasi publik untuk mempertimbangkan peran gender dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memberikan manfaat yang sama bagi pria dan wanita. Dengan menggunakan metode dalam ilmu administrasi publik untuk memastikan bahwa isu gender dipertimbangkan pada setiap tahap siklus kebijakan publik. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) (2020), tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian integral dari perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dengan memperkenalkan perspektif gender ke dalam ilmu administrasi publik, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih inklusif dan seimbang gender. Para akademisi terus meneliti dan mengembangkan teori berdasarkan dimensi gender. Dengan cara ini, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih menanggapi kebutuhan dan harapan pria dan wanita dalam masyarakat.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa hubungan antara ilmu administrasi publik dan gender sangat penting untuk memastikan keberhasilan, publik.,kebijakan publik dan pembangunan. Dengan mempertimbangkan isu stereotip gender pada setiap tahap kebijakan publik, harapannya kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sama bagi anggota organisasi maupun semua masyarakat.

5. Persepsi

a.) Konsep Persepsi

Menurut Walgito (2010, p.18), persepsi adalah proses yang melibatkan pengamatan, penilaian, dan interpretasi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal . Dalam konteks penelitian ini, teori persepsi akan digunakan untuk memahami bagaimana pegawai perempuan di bidang pelayanan publik memandang dan merespons stereotip gender yang ada. Dalam penelitian ini akan berfokus pada masalah stereotip gender pada penempatan perempuan di pelayanan publik di kelurahan sulingan kecamatan murung pudak melalui persepsi.

b.) Komponen Utama dari Persepsi

Walgito (2010) menyebutkan persepsi terbentuk melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan.

1. Pengamatan

Ini adalah langkah awal di mana individu mengamati situasi atau objek di sekitarnya. Dalam proses pengamatan ini, pegawai

perempuan mengamati interaksi di tempat kerja, termasuk bagaimana pegawai laki-laki dan perempuan diperlakukan. Pengamatan ini menjadi dasar bagi penilaian dan interpretasi selanjutnya.

2. Penilaian

Setelah melakukan pengamatan, individu akan menilai situasi berdasarkan pengalaman, nilai-nilai, dan norma yang dianut. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap peran yang dijalani oleh pegawai perempuan dan laki-laki. Misalnya, pegawai perempuan mungkin menilai bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka

3. Interpretasi

Proses di mana individu memberikan makna pada pengalaman yang mereka alami. Dalam proses Interpretasi ini, penting untuk menggali bagaimana pegawai perempuan memberikan makna pada posisi mereka dalam organisasi dan bagaimana stereotip gender mempengaruhi peran mereka. Interpretasi ini dapat mencakup perasaan, harapan, dan aspirasi mereka dalam konteks pekerjaan

c.) Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

1. Pengalaman Pribadi

Pengalaman individu sebelumnya dapat membentuk cara

mereka melihat situasi saat ini. Misalnya, pengalaman kerja dan pendidikan dapat mempengaruhi persepsi pegawai perempuan tentang kemampuan mereka dan peran gender. Pengalaman positif atau negatif di tempat kerja dapat memperkuat atau melemahkan stereotip yang ada.

2. Lingkungan Sosial dan Budaya

Norma dan nilai yang ada dalam masyarakat juga berperan penting dalam membentuk persepsi. Persepsi pegawai perempuan tentang stereotip gender di tempat kerja bisa dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang peran perempuan. Misalnya, jika masyarakat menganggap bahwa perempuan seharusnya tidak memegang posisi kepemimpinan, hal ini dapat mempengaruhi cara pegawai perempuan memandang diri mereka sendiri dalam konteks pekerjaan

d.) Implikasi untuk Penelitian

Dalam penelitian ini, teori persepsi Walgito (2010) dapat digunakan untuk:

1. Mengetahui Pengamatan

Menggali bagaimana pegawai perempuan mengamati interaksi gender di tempat kerja dan bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan mereka tentang peran mereka.

2. Mengeksplorasi Penilaian

Memahami bagaimana pegawai perempuan menilai peran

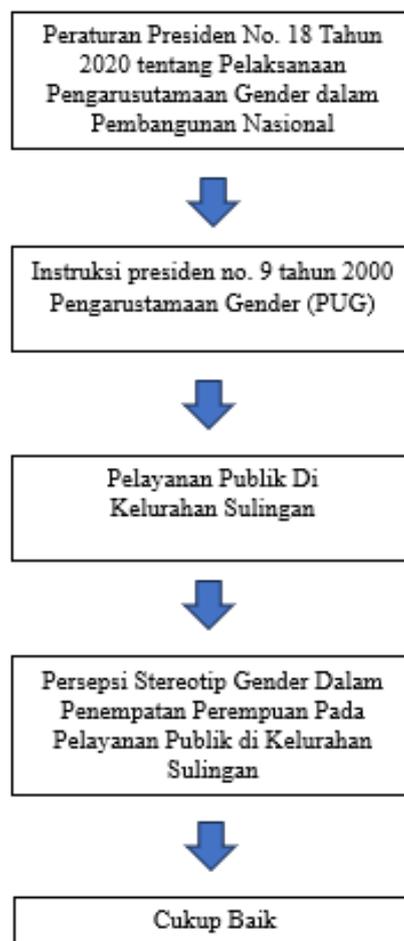
mereka dan rekan-rekan laki-laki dalam organisasi, serta bagaimana penilaian ini dipengaruhi oleh stereotip gender.

3. Menggali Interpretasi

Mengetahui makna yang diberikan pegawai perempuan pada pengalaman mereka dalam menghadapi stereotip gender, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk identitas dan aspirasi mereka.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



Sumber: data diolah oleh peneliti